



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Layana Indah

Analysis of Non-Cash Food Assistance Distribution on the Welfare of the Layana Indah Village Community

Sukma

Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tadulako

*Correspondence Author: sukma9008@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Bantuan Sosial Non Tunai,
Kemiskinan, Kesejahteraan
Masyarakat

Keywords:

Non-Cash Social Assistance,
Poverty, Community Welfare

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7588](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7588)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Layana Indah, dengan fokus pada penerapan indikator 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan perangkat kelurahan, penerima manfaat, dan tokoh masyarakat, serta observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari reduksi data, penyajian data naratif, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah penerima bantuan dari 413 KK pada 2021 menjadi 528 KK pada 2023. Namun, implementasi program masih menghadapi beberapa tantangan. Aspek tepat sasaran terkendala akurasi data dan pemahaman kriteria penerima. Tepat jumlah belum sepenuhnya ideal karena bantuan seragam tidak mengakomodasi variasi kebutuhan dan fluktuasi harga. Sistem tunai memberikan fleksibilitas, tetapi memunculkan tantangan terkait tepat harga dan kualitas. Meskipun penyaluran umumnya tepat waktu, kendala teknis dan administratif masih terjadi. Aspek administrasi telah berjalan cukup baik, namun perlu peningkatan dalam keakuratan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun program memberikan dampak positif, perbaikan dalam implementasi, khususnya pemenuhan indikator 6T, diperlukan untuk memaksimalkan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) towards community welfare in Layana Indah Village, with a focus on the implementation of the 6T indicators (Right Target, Right Amount, Right Time, Right Price, Right Quality, and Right Administration). This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews with village officials, beneficiaries, and community leaders, as well as observation and documentation. Data analysis was carried out inductively, starting from data reduction, narrative data presentation, to drawing conclusions. The results of the study showed an increase in the number of aid recipients from 413 families in 2021 to 528 families in 2023. However, program implementation still faces several challenges. The right-target aspect is constrained by data accuracy and understanding of recipient criteria. The right amount is not entirely ideal because uniform assistance does not accommodate variations in needs and price fluctuations. The cash system provides flexibility, but raises challenges related to right price and quality. Although distribution is generally on time, technical and administrative constraints still occur. The administrative aspect has been running quite well, but it needs improvement in data accuracy. This study concludes that although the program has a positive impact, improvements in implementation, especially the fulfillment of the 6T indicators, are needed to maximize its effectiveness in improving community welfare.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan, menurut KBBI, merujuk pada kondisi aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya, sentosa berarti terbebas dari kesukaran, dan makmur berarti serba kecukupan. Kemiskinan terjadi ketika sekelompok orang mengalami kekurangan materi relatif terhadap standar hidup masyarakat (Destina *et al.*, 2023). Kemiskinan berdampak luas, menghambat pembangunan dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Pemerintah Indonesia menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas. Data BPS menunjukkan tren penurunan kemiskinan 2019-2021. Pada Maret 2021, 27,54% penduduk Indonesia miskin meningkat dibandingkan 2020 (26,42%) dan 2019 (25,14%), diduga akibat pandemi Covid19 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021).

Pemerintah melakukan berbagai inisiatif, termasuk subsidi seperti program subsidi beras (raskin). Sejak krisis pangan 1998, pemerintah memprioritaskan hak pangan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK), memberikan subsidi beras tepat sasaran bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan rawan pangan. OPK kemudian diubah menjadi Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin) pada 2002, sebagai inisiatif lintas sektoral yang melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Selain raskin, pemerintah juga menerapkan program bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin memenuhi kebutuhan dasar, dengan harapan meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan proyeksi BPS, Kota Palu berpenduduk 387.493 jiwa, dengan kepadatan 981 jiwa/km², dan Kecamatan Mantikulore sebagai wilayah dengan persentase penduduk tertinggi (20,91%). Survei Angkatan Kerja Nasional 2023 mencatat angkatan kerja Kota Palu sebanyak 197.368 orang dan bukan angkatan kerja 87.519 orang. Tingkat penduduk bekerja mencapai 94,35% dan pengangguran 5,64%. Menurut BPS Kota Palu, faktor yang memengaruhi angka kemiskinan 2024 antara lain inflasi tahunan 2,41% (2023-2024), kenaikan upah padat karya dari Rp750 ribu menjadi Rp1 juta, harga kebutuhan pokok yang relatif stabil, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,65% (turun 0,50% dari 2022), dan 7,82% penduduk berusia 5 tahun ke atas berstatus migran (Sensus Penduduk 2020). Menurut data BPS Kota Palu memiliki persentase penduduk miskin terendah di Sulawesi Tengah (5,94%), sementara Kabupaten Tojo Una-Una tertinggi. Meskipun persentase kemiskinan di Kota Palu terendah, jumlah penduduk miskin absolutnya menempati urutan kedelapan di antara kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, yaitu 24,57 ribu jiwa. Kabupaten Parigi Moutong memiliki persentase penduduk miskin tertinggi, sedangkan Kabupaten Banggai Laut terendah.

Garis Kemiskinan merupakan ambang batas pengeluaran minimal untuk kebutuhan pangan dan nonpangan. Seseorang dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan dianggap miskin. Garis Kemiskinan cenderung meningkat dari 2020 hingga 2024. Di Kota Palu, Garis Kemiskinan bulanan per Maret 2024 adalah Rp658.112 per orang, meningkat 4,09% dari Maret 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh mahalnya harga kebutuhan pokok.

Bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200.000 pada 2021 telah dirasakan manfaatnya di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore. Namun, kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi kendala. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Nasional Maret 2024 naik 3,64% secara tahunan dibanding Maret 2023, dengan kenaikan terbesar pada sektor pertanian (8,56%). Komoditas yang naik harganya antara lain beras, coklat, jahe, dan air minum. Evaluasi program bantuan sosial dan BPNT penting untuk mengukur efektivitasnya dalam mengatasi dampak kenaikan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPNT sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan dampak program tersebut terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Evaluasi dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana program BPNT telah mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di masa mendatang.

Penelitian Pantu (2019) menganalisis BPNT-D di Gorontalo, menemukan bahwa program tersebut kurang berdampak pada konsumsi rumah tangga di perdesaan, namun cukup efektif di perkotaan. Gultom *et al* (2020) meneliti pengaruh BPNT dan PKH terhadap kemiskinan di Minahasa Tenggara, menunjukkan bahwa BPNT berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Senada dengan itu, penelitian Nadhifah & Mustofa (2021) mengukur pengaruh PKH dan BPNT terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi, menggunakan data *time series* 2018-2020 di Pucakwangi. Hasilnya, BPNT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Implementasi BPNT di Kelurahan Layana Indah sejak 2019, yang menargetkan 528 KK dari 1.318 jiwa penduduk, menghadapi tantangan signifikan dalam pemenuhan indikator 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan.

Ketidaktepatan sasaran akibat data penerima yang kurang akurat dan verifikasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan *inclusion error* dan *exclusion error*. Aspek tepat jumlah juga terkendala karena bantuan seragam tidak mempertimbangkan variasi kebutuhan dan fluktuasi harga. Peralihan ke sistem tunai, meskipun bertujuan memberi fleksibilitas, memunculkan tantangan terkait tepat harga dan kualitas, membuka potensi fluktuasi harga dan sulitnya pengawasan kualitas barang. Ketidaktepatan waktu penyaluran akibat kendala teknis dan administratif juga menjadi masalah. Meski administrasi umumnya berjalan baik, peningkatan detail dan akurasi pencatatan data tetap diperlukan. Perubahan mekanisme penyaluran dari non-tunai ke tunai juga memengaruhi dinamika implementasi. Rangkaian masalah ini mengindikasikan kesenjangan antara tujuan ideal BPNT dan realitas di lapangan. Penelitian mendalam dan komprehensif diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan BPNT di Layana Indah, khususnya dalam konteks pemenuhan indikator 6T.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Layana Indah. Dengan menganalisis penerapan indikator 6T, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang masih ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Layana Indah. Evaluasi ini difokuskan pada empat indikator pengukuran yaitu sosialisasi program, ketepatan sasaran program, pemantauan atau pengawasan program, serta tujuan program serta untuk mengetahui realisasi indikator 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan Tepat Administrasi) di Kelurahan Layana Indah. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Layana Indah dengan informasi pemerintah Kelurahan Layana Indah. Data yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian kali ini merupakan data yang sesuai dengan fakta di lapangan dan informan yang diperoleh dari pemberi data. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi

Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dengan reduksi data untuk mengidentifikasi informasi kunci dan menghapus yang tidak relevan, lalu dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk naratif dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan, dengan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Layana Indah, berikut adalah rincian penerimaan bantuan yang diterima oleh warga Kelurahan Layana Indah selama periode 2021-2023.

Data ini mencakup jumlah penduduk, jumlah penerima bantuan (dalam Kepala Keluarga/KK), dan besaran bantuan yang diterima per Kepala Keluarga.

Tabel 1. Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Layana Indah

1. No	2. Tahun	3. Jumlah Penduduk 4. Kelurahan Layana Indah	5. Jumlah penerima/ 6. Kepala Keluarga	7. Jumlah Bantuan/ 8. Kepala Keluarga
9. 1	10. 2021	11. 1.236	12. 413	13. Rp. 200.000
14. 2	15. 2022	16. 1.276	17. 467	18. Rp. 200.000
19. 3	20. 2023	21. 1.318	22. 528	23. Rp. 200.000

Sumber: Kelurahan Layana Indah

Berdasarkan Tabel 1 Penerimaan Bantuan di Kelurahan Layana Indah, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah penduduk dan penerima bantuan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kelurahan Layana Indah tercatat sebanyak 1.236 jiwa dengan 413 kepala keluarga yang menerima bantuan sebesar Rp200.000 per kepala keluarga. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.276 jiwa dengan 467 kepala keluarga penerima bantuan. Terakhir, pada tahun 2023, jumlah penduduk bertambah menjadi 1.318 jiwa dan jumlah penerima bantuan mencapai 528 kepala keluarga dengan besaran bantuan yang tetap sama yaitu Rp200.000 per kepala keluarga. Meskipun jumlah bantuan per kepala keluarga tetap konsisten sebesar Rp200.000, namun peningkatan jumlah penerima bantuan ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Layana Indah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan kondisi ekonomi, atau adanya kebijakan pemerintah yang memperluas cakupan penerima bantuan sosial.

Peningkatan jumlah penerima bantuan di Kelurahan Layana Indah sebagaimana tertuang dalam tabel, mengindikasikan bahwa program bantuan sosial telah berhasil menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Namun, perlu dipertanyakan apakah peningkatan jumlah penerima ini diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Faktor-faktor seperti efektivitas pemanfaatan bantuan, kualitas bantuan yang diberikan, dan mekanisme penyaluran yang transparan perlu menjadi perhatian. Selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah bantuan yang diberikan telah mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut.

Analisis Penyaluran BPNT

Untuk mengamati analisis dari pelaksanaan penyaluran BPNT, proses penyaluran bansos diukur dengan menggunakan 4 indikator menurut Budhiani, yaitu ketepatan, sosialisasi, tujuan program dan pemantauan (Amelia, 2015). Hal ini termasuk dalam konsep manajemen strategi yang harus diterapkan dalam melakukan penyaluran bantuan sosial.

Sosialisasi Program

Sebelum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masyarakat di Kelurahan Layana Indah terlebih dahulu diberikan sosialisasi mengenai program ini. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami tujuan, syarat, dan cara mendapatkan bantuan. Kelurahan Layana Indah, Program BPNT, Kelurahan Layana telah membentuk Tim Koordinasi BPNT yang bertugas untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Dengan adanya sosialisasi yang terstruktur ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Layana Indah dapat memanfaatkan bantuan sosial dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Pemantauan Program

Pemantauan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Layana Indah bertujuan untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut berhasil mencapai tujuannya, yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memutus mata rantai kemiskinan. Melalui mekanisme pemantauan ini, diharapkan dapat diidentifikasi secara dini jika ada kendala atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Dengan demikian, efektivitas program bantuan sosial di Kelurahan Layana Indah dapat ditingkatkan dan kesejahteraan masyarakat pun dapat terjamin.

Tepat Sasaran

Indikator "tepat sasaran" menjadi fokus utama evaluasi penyaluran BPNT di Kelurahan Layana Indah. Analisis awal data menunjukkan tantangan dalam memastikan ketepatan sasaran, meskipun telah diupayakan pendataan melalui Kepala Dusun dan sistem SIKS-NG. Wawancara dengan Bapak Wahyu mengkonfirmasi masalah akurasi data. Beliau menyatakan bahwa perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cepat membuat data tidak *up-to-date*, berpotensi menyebabkan *inclusion error* (warga mampu menerima bantuan) dan *exclusion error* (warga miskin tidak terdata). Bapak Wahyu menekankan pentingnya peningkatan frekuensi pemutakhiran data, penguatan verifikasi dan validasi, serta sosialisasi kriteria penerima manfaat.

Sesuai dengan Bapak Wahyu, Ibu Nirma menambahkan faktor lain yang mempengaruhi akurasi data, seperti kesalahan pencatatan dan perubahan alamat. Beliau menyoroti pentingnya pelibatan seluruh perangkat desa dalam pendataan dan verifikasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk pemutakhiran data, serta sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami kriteria dan prosedur penerima manfaat. Hasil wawancara ini memvalidasi dan memperdalam pemahaman masalah "tepat sasaran" yang bersumber dari akurasi data yang belum optimal akibat perubahan sosial ekonomi, kesalahan pencatatan, perubahan alamat, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Upaya perbaikan yang diusulkan meliputi peningkatan frekuensi pemutakhiran data, penguatan mekanisme verifikasi dan validasi, pelibatan perangkat desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan intensifikasi sosialisasi.

Tepat Jumlah

Aspek "tepat jumlah" dalam penyaluran BPNT di Kelurahan Layana Indah penting untuk memastikan bantuan sesuai kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penelitian menemukan potensi ketidaksesuaian antara jumlah bantuan dan kebutuhan riil, meskipun penyaluran umumnya telah memenuhi standar.

Wawancara dengan Bapak Wahyu mengungkap perbedaan kebutuhan pangan tiap keluarga, dipengaruhi jumlah anggota dan fluktuasi harga. Beliau mengusulkan evaluasi berkala dan mekanisme penyesuaian fleksibel, seperti bantuan tambahan untuk keluarga dengan kebutuhan khusus atau penyesuaian nilai berdasarkan indeks harga pangan. Senada, Ibu Nirma menekankan dinamika kebutuhan pangan, terutama saat ada anggota keluarga sakit atau dalam masa pertumbuhan. Beliau mendukung pemantauan, evaluasi berkelanjutan, dan fleksibilitas penyaluran. Hasil wawancara ini memberikan perspektif berharga. Heterogenitas dan dinamika kebutuhan pangan antar KPM menuntut evaluasi berkala dan mekanisme penyesuaian lebih fleksibel untuk memastikan BPNT optimal memenuhi kebutuhan pangan seluruh KPM di Kelurahan Layana Indah.

Tepat Harga

Aspek "tepat harga" dalam penyaluran BPNT tunai menghadapi tantangan signifikan akibat fluktuasi harga dan potensi kualitas barang yang buruk. Wawancara dengan Bapak Wahyu dan Ibu Nirma menyoroti perlunya upaya komprehensif. Bapak Wahyu menekankan kerjasama dengan

pedagang, pemantauan harga pasar, edukasi KPM tentang pemilihan produk berkualitas dan terjangkau, fitur pemantauan dana, serta kerjasama dengan koperasi/keompok tani untuk stabilitas harga dan kualitas. Ibu Nirma memperkuat pentingnya kewaspadaan terhadap kenaikan harga dan kualitas barang, menekankan edukasi KPM melalui diskusi atau panduan, serta kerjasama dengan koperasi/keompok tani untuk menyediakan bahan pangan terjangkau dan berkualitas. Kesimpulannya, untuk memastikan "tepat harga" dan manfaat optimal BPNT, diperlukan kombinasi strategi: pemantauan harga pasar, kerjasama dengan pedagang dan koperasi/keompok tani, edukasi KPM, dan fitur pemantauan dana, serta evaluasi berkala.

Tepat Waktu

Ketepatan waktu penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan indikator krusial agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memenuhi kebutuhan pangan secara konsisten. Penelitian dan wawancara dengan Bapak Wahyu dan Ibu Nirma di Kelurahan Layana Indah menunjukkan bahwa umumnya penyaluran telah sesuai jadwal. Namun, beberapa kendala masih menjadi perhatian. Bapak Wahyu menjelaskan bahwa tujuan ketepatan waktu adalah agar seluruh KPM menerima bantuan sesuai jadwal, meskipun terkadang terhambat kendala teknis seperti gangguan jaringan internet atau masalah mesin EDC, serta faktor administratif seperti perubahan kebijakan atau keterlambatan data penerima manfaat. Ibu Nirma juga menekankan fokus pada ketepatan waktu dan mengamini potensi kendala serupa. Keduanya menyoroti dampak signifikan keterlambatan bagi KPM yang sangat bergantung pada bantuan ini. Oleh karena itu, meskipun penyaluran umumnya tepat waktu, antisipasi terhadap kendala teknis dan administratif tetap diperlukan untuk memastikan penyaluran dan optimalisasi manfaat BPNT bagi KPM.

Tepat Kualitas

Perubahan sistem penyaluran BPNT dari non-tunai ke tunai menimbulkan tantangan dalam indikator "tepat kualitas." Wawancara dengan Bapak Wahyu dan Ibu Nirma menyoroti kesulitan pemantauan kualitas barang yang diterima KPM setelah peralihan ke sistem tunai. Sebelumnya, kualitas dapat dipantau langsung, namun kini bergantung pada laporan KPM, membuka potensi penyimpangan penggunaan dana. Bapak Wahyu menekankan pentingnya edukasi KPM tentang gizi dan kerjasama dengan pedagang lokal untuk menyediakan produk berkualitas. Senada, Ibu Nirma menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat, serta pelibatan tokoh masyarakat dan kader untuk mengawasi penggunaan bantuan. Ringkasnya, peralihan ke sistem tunai mempersulit pemantauan kualitas dan meningkatkan potensi penyimpangan, sehingga diperlukan upaya edukasi, kerjasama, dan pengawasan yang lebih intensif.

Tepat Administrasi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyu dan Ibu Nirma, indikator "tepat administrasi" dalam penyaluran BPNT di Kelurahan Layana Indah menunjukkan ketersediaan dokumen yang memadai, seperti daftar penerima manfaat, laporan penyaluran, dan bukti transaksi. Namun, keduanya menekankan perlunya peningkatan dalam hal keakuratan dan pembaruan data, terutama terkait perubahan status penerima manfaat, seperti pindah atau meninggal. Bapak Wahyu menyoroti pentingnya pencatatan data yang lebih teliti dan pembaruan data berkala, serta sosialisasi kepada petugas lapangan mengenai pengisian dokumen yang lengkap dan akurat. Senada dengan itu, Ibu Nirma mengusulkan pembuatan jadwal khusus untuk pengecekan dan pembaruan data rutin, serta peningkatan sosialisasi prosedur administrasi kepada petugas lapangan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data, mempermudah monitoring dan evaluasi program BPNT, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Analisis Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Layana Indah

Dalam wawancara dengan Kepala Dusun, beliau menyampaikan bahwa proses pendataan penerima bantuan sosial di Kelurahan Layana Indah telah dilakukan secara berkala. Namun, beliau mengakui adanya kendala dalam menjaga keakuratan data, terutama terkait dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa sosialisasi program bantuan sosial dan BPNT telah dilakukan, namun masih ada beberapa warga yang belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyaluran dan syarat penerima manfaat. Selain itu, Kepala Dusun juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa keluhan dari masyarakat terkait kualitas komoditas yang diterima, terutama pada jenis tertentu.

Penerima bantuan yang diwawancarai menyampaikan bahwa bantuan yang diterima sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk membeli bahan pangan. Namun, beliau juga mengeluhkan bahwa jumlah bantuan yang diterima masih kurang mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Selain itu, beliau berharap agar kualitas komoditas yang diberikan dapat lebih ditingkatkan, terutama terkait dengan kesegaran dan keragaman jenis pangan.

Pak Lurah mengakui bahwa program BPNT telah memberikan dampak positif dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin di Kelurahan Layana Indah. Namun, beliau juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan sulitnya mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, Pak Lurah juga menyampaikan bahwa perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap program BPNT untuk mengukur efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Peningkatan jumlah penerima bantuan di Kelurahan Layana Indah merupakan langkah positif dalam upaya pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Namun, hasil penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti Kepala Dusun, penerima manfaat, dan Pak Lurah, menunjukkan bahwa kualitas implementasi program BPNT masih perlu ditingkatkan.

Evaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Layana Indah menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan indikator 6T. Meskipun terdapat upaya untuk memastikan bantuan tepat sasaran, namun masih ditemukan sejumlah kendala seperti ketidakakuratan data, proses verifikasi yang kurang optimal, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kriteria penerima manfaat. Dalam hal tepat jumlah, besaran bantuan yang seragam belum tentu memenuhi kebutuhan setiap keluarga, sementara fluktuasi harga pangan juga mempengaruhi daya beli. Sistem penyaluran tunai yang memberikan kebebasan memilih kepada penerima manfaat memang fleksibel, namun juga menimbulkan tantangan terkait tepat harga seperti fluktuasi harga dan kualitas barang yang tidak terjamin. Penyaluran bantuan secara umum tepat waktu, namun kendala teknis dan administratif dapat menyebabkan keterlambatan. Aspek tepat kualitas juga menjadi perhatian, terutama setelah pengalihan penyaluran menjadi tunai. Terakhir, meskipun administrasi penyaluran telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dalam hal detail dan keakuratan pencatatan data.

KESIMPULAN

Program BPNT di Kelurahan Layana Indah telah memberikan dampak positif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan, ditandai dengan peningkatan jumlah penerima bantuan. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan. Evaluasi berdasarkan indikator 6T (tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas, dan administrasi) mengungkap beberapa tantangan. Ketidakakuratan data dan kurang optimalnya verifikasi mempengaruhi ketepatan sasaran. Besaran bantuan yang seragam belum tentu mencukupi kebutuhan setiap keluarga, dan fluktuasi harga mempengaruhi daya beli. Sistem tunai menimbulkan tantangan dalam memastikan tepat harga dan kualitas barang. Meskipun penyaluran umumnya tepat waktu, kendala teknis dan administratif masih

terjadi. Terakhir, meskipun administrasi cukup baik, keakuratan data perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh diperlukan, meliputi pemutakhiran data, penguatan verifikasi, penyesuaian besaran bantuan, pengawasan harga dan kualitas,antisipasi kendala penyaluran, serta peningkatan akurasi administrasi, untuk memaksimalkan efektivitas program dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Perbaiki sistem pendataan dan verifikasi penerima manfaat melalui pemutakhiran data yang lebih sering, pelibatan aktif perangkat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sosialisasi kriteria penerima juga penting.

Evaluasi dan penyesuaian besaran bantuan secara berkala berdasarkan dinamika kebutuhan dan fluktuasi harga, dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga, kondisi ekonomi, dan indeks harga pangan.

Penguatan pengawasan dan edukasi terkait kualitas barang dan penggunaan dana BPNT, terutama setelah peralihan ke sistem tunai. Edukasi gizi dan pemilihan bahan pangan berkualitas perlu ditingkatkan, serta kerjasama dengan pedagang dan koperasi/kelompok tani. Mekanisme pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. P., Ciptawaty, U., Wahyudi, H., Yuliawan, D., & Ratih, A. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Indikator 6t Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. *Journal on Education*, 6(3), 17171–17182.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar. *Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar*, 2(11), 3–5.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen.
- Destina Mae Tika, Abd. Malik, & Nurlia Fusfita. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 293–311. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i3.2514>
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) DAN Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39–53.
- Hanum, N. (2018). 327251951. 2(1), 75–84.
- Ikhwan Ratna, & Nasrah, H. (2015). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 14(2), 6.
- Irham, M., Harahap, N., Kumala, R., Tarigan, A. A., & Yafiz, M. (2022). Perbandingan Teori Konsumsi Irving Fisher, M.a Mannan Dan Monzer Kahf. *Edunomika*, 06(02), 1–15.
- Nadhifah, L. R., & Mustofa, N. H. (2021). Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4510>
- Pantu, S. D. (2019). Analisis Dampak Program Bantuan Pangan NonTunai Daerah (BPNT-D) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo. *Skripsi*, Hlm, 1–10.
- Putong, I. (2015). *Ekonomi Makro. Pengantar Untuk Dasar-Dasar Ilmu Dalam Ekonomi Makro*, 1.
- Ramadhan, A., Rahim, M. S. R., Kom, S., Kom, M., & Utami, N. N. (2023). Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio). *Tahta Media*, 02(2), 34–37. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/144>
- Rupiarsieh, & Musta'ana. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non- Tunai (Bpnt)

dengan Metode E-Warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(2), 16–29. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i2.55>

Sholihin, A. I. (2013). *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama.